

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengelola kemajemukan bukanlah perkara mudah untuk dilakukan. Pada satu sisi, umat beragama sebagai komponen bangsa berusaha memelihara identitas dan memperjuangkan aspirasinya sendiri. Pada sisi lain mereka juga dituntut untuk memberikan andil dan kontribusi signifikan dalam rangka memelihara kerukunan dan keutuhan bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dengan kepentingan nasional.¹

Kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat merupakan keniscayaan dan dambaan setiap insani. Terlebih di tengah-tengah kemajemukan agama di masyarakat Indonesia. Pada hakikatnya setiap manusia dan semua agama menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan komitmen terhadap anti-kekerasan, tetapi di saat bersamaan kekerasan atas nama agama selalu terjadi dengan mengorbankan umat-Nya yang tidak sedikit jumlahnya.²

Pengertian pluralisme agama di masyarakat memiliki ragam atau konsep yang berbeda-beda. Untuk menyamakan konsep tersebut, maka perlu dipaparkan konsep yang tepat terkait pluralisme agama. Kata “*pluralisme*” berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata “*plural*” yang berarti banyak atau majemuk. Pluralisme (kemajemukan) adalah sesuatu yang diterima (*given*). Artinya, suka atau tidak suka,

¹ Mohammad Takdir, “Model-Model Kerukunan Umat Beragama Berbasis Local Wisdom,” *Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)* Vol. 1, no. 1 (2017): 5, <https://doi.org/10.32332/tapis.v1i01.728>.

² M. Y. Wibisono, “Agama, Kekerasan Dan Pluralisme Dalam Islam,” *Jurnal Kalam* Vol. 2, no. 9 (2017). 187.

mau atau tidak mau, harus begitu. Ini fakta yang tidak bisa dan tidak boleh dinafikan. Pluralisme juga adalah pilihan yang mengacu pada ideologi yang ditawarkan oleh sejarah Indonesia.³

Menurut Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, pluralisme secara substansional termanifestasi dalam sikap untuk saling mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak, atau banyak.⁴

Sementara itu, menurut Sutarno dalam Hendri Masduki, pluralisme merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa. Keragaman atau kemajemukan dalam suatu bangsa itu haruslah senantiasa dipandang positif dan optimis sebagai kenyataan *riil* oleh semua anggota lapisan masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵ Pluralisme adalah pandangan yang saling mengakui dan menghormati keragaman serta kemajemukan dalam suatu masyarakat dan bangsa.

Indonesia adalah negara yang ditandai oleh berbagai agama, bahasa, suku, budaya dan adat istiadat. Kemajemukan ini tidak hanya membuat negara Indonesia menarik, unik dan kaya akan tradisi (multikultural), tetapi juga multi-agama. Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Setiap pulau dan wilayah memiliki kebiasaan dan karakteristiknya sendiri. Ini tercermin dalam moto "*Persatuan dalam Keragaman*" (meskipun berbeda) di Republik Indonesia.⁶

Salah satu agenda besar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan serta membangun kesejahteraan hidup bersama

³ A. A. Yewangoe., *Allah Mengijinkan Manusia Mengalami Diri-Nya: Pengalaman Dengan Allah Dalam Konteks Indonesia Yang Berpancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018). 362-363.

⁴ N. Naim & A. S., *Pendidikan Multikultural Konsep Dan Aplikasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008). 4.

⁵ H. Masduki, Pluralisme Dan Multikulturalisme Dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama, *Jurnal Dimensi* Vol. 1, No. 9. (2016). 15-23.

⁶ Nimrod Frebdes Taopan et al., "Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan: Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Meningkatkan Kualitas Sikap Hidup Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Kupang," *Pascasarjana Universitas Nusa Cendana Kupang*, Vol 1, No. 9 (2020). 1.

seluruh warga negara dan umat beragama. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan ke arah keutuhan dan kesejahteraan adalah masalah kerukunan sosial, termasuk di dalamnya hubungan antara agama dan kerukunan hidup umat beragama.⁷

Namun, di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan keragaman, dambaan mulia tersebut masih terusik dengan adanya letupan atau gesekan-gesekan kecil dalam masyarakat. Gesekan tersebut salah satunya dipicu oleh egosentris kesukuan, agama, dan ras. Gesekan yang dipicu oleh egosentris tersebut, tidak dapat dipungkiri sedikit banyaknya dipengaruhi oleh perkembangan modernisasi, liberalisasi, dan globalisasi. Seperti yang ditegaskan oleh Sirry dalam tulisan Talib, “Saat ini kita hidup dalam dunia yang bergerak begitu cepat ke arah pluralisme dengan beragam agama, bahasa dan budaya sebagai akibat dari perkembangan modernisasi, liberalisasi dan globalisasi”.⁸

Tantangan oleh karena derasnya arus perkembangan tersebut, juga berpengaruh pada derasnya tantangan pluralisme di masyarakat. Tantangan pluralisme tersebut bukan tidak ada alasan. Terutama dalam hal menyatukan konsep pemahaman pluralisme di tengah-tengah masyarakat. Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai agama dan suku, yang justru hanya bisa menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme.

Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai “kebaikan negatif”, hanya ditilik dari kegunaannya untuk memungkinkan fanatisme (*to keep fanaticism at bay*), akan tetapi pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engagment of diversities within the bonds of civility*).⁹

⁷ M. L. Bauto, “*Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)*,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* Vol. 2, no. 23 (2018). . 11–25.

⁸ A. A. Talib, *Pluralisme Sebagai Keniscayaan Dalam Membangun Keharmonisan Bangsa* (Makasar: UIN Alauddin, 2015). 61-63.

⁹ Talib. 78.

Menurut Raimundo Panikkar, untuk memahami agama orang lain secara komprehensif, harus memahami agama mereka melalui bahasa aslinya. Tidak bisa mengabaikan perbedaan yang ada pada masing-masing agama untuk menarik kesimpulan bahwa “semua harus satu”. Menurutnya, ada tiga macam sikap keberagaman manusia: eksklusif, inklusif, dan paralel/jamak. Sikap eksklusif berarti menganggap bahwa agamanya adalah satu-satunya yang benar, sedangkan yang lain salah; sikap inklusif berarti seseorang berpikir bahwa agamanya adalah agama yang paling benar, tetapi agama lain juga mengandung kebenaran; sikap jamak berarti menganggap bahwa semua agama adalah sama dan masing-masing mengandung kebenaran.¹⁰ Dalam hal ini satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui dialog antar-umat beragama.

Dialog antar-umat beragama secara umum di Indonesia mengalami berbagai perkembangan. Dalam perkembangannya dialog tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni berdasarkan pelakunya: pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Ketiga kategori ini dapat dikatakan pula mewakili tiga kekuatan dalam sebuah negara: pemerintah, masyarakat sipil dan pasar. Di Indonesia, telah ada inisiatif untuk melakukan dialog, di mana pada awalnya sebagai respons terhadap konflik-konflik lokal yang melibatkan komunitas-komunitas umat beragama pasca tahun 1965. Berangkat dari latar belakang ini, kemudian bermunculan dialog-dialog yang secara umum baik oleh pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat sipil maupun akademisi.¹¹

Dialog bukanlah sesuatu yang baru dalam negeri Indonesia. Dialog harusnya diberi perhatian mendalam agar menjadi dampak dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai ketegangan yang terjadi di antara umat beragama biasanya dihindari dengan tidak

¹⁰ Raimundo Panikkar, *Intrareligious Dialogue*, (New York: Paulist Press, 1999). 15.

¹¹ UGM, “Dialog Antar Umat Beragama Ala Indonesia,” CRCS - UNIVERSITAS GADJAH MADA, 2020, <https://doi.org/https://crs.ugm.ac.id/dialog-antar-umat-beragama-ala-indonesia/>, <https://crs.ugm.ac.id/dialog-antar-umat-beragama-ala-indonesia/>.

dibicarakan lebih jauh. Kemajemukan adalah ciri dari bangsa Indonesia. Namun, kerukunan harus tidak mengorbankan kebebasan. Kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kerukunan semu terjadi apabila orang berada dalam *status quo* (keadaan dalam waktu tertentu) masing-masing.¹²

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, dimensi kebersamaan dalam masyarakat tidak hanya terjadi pada aras teologis saja, melainkan juga pada aras ideologis dan kultural. Kesungguhan dari setiap agama untuk memeluk erat nilai-nilai kultural bangsa Indonesia di dalam perbendaharaan agamanya. Situasi ini memungkinkan setiap agama untuk mengembangkan dialog yang berpadanan dengan kebutuhan bersama seluruh warga masyarakat, dalam upaya bersama menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu program dialog bisa menjawab tantangan yang ada melalui dan inisiatif-inisiatif dialog antar-umat beragama yang dilaksanakan secara berkesinambungan.¹³

Indonesia adalah rumah bersama yang perlu untuk dirawat dan bangun bersama. Dalam rumah Indonesia ini, warga sebangsa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Untuk itu para pemimpin agama di Indonesia memiliki tugas untuk mempromosikan relasi dialogis di antara umat beragama di daerah ini. Kerukunan mesti dimulai dari para pemimpin, tetapi tidak boleh berakhir di sana. Ruang perjumpaan perlu pula diciptakan untuk kesempatan bertemu dan belajar bersama antar umat, agar melalui perjumpaan itu, umat/masyarakat belajar mengenal dan menghargai perbedaan serta

¹² A. A. Yewangoe., *Tidak Ada Penumpang Gelap. Warga Gereja, Warga Bangsa.* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009). 177-178.

¹³ Erick J. Barus, *Hubungan Kristen Islam Dalam Panggung Dialog* (Sulawei Utara: UKIT PRESS, 2018). 74.

membuka diri untuk berbagi (memberi dan menerima) dari kekayaan agama masing-masing.¹⁴

Agama-agama berkewajiban untuk memperjuangkan kedamaian dan keadilan bagi segenap manusia dan segenap makhluk, termasuk alam yang tak dapat bersuara untuk dirinya sendiri. Dalam konteks Indonesia, agama-agama berperan untuk menghadirkan *shalom/salaam* dalam konteks kemiskinan, keterbelakangan, perdagangan orang, kerusakan ekologis, dan sejumlah masalah sosial dan ekologis lainnya.¹⁵

Daerah di Indonesia Timur ini, ternyata memiliki cara dan pendekatan sendiri dalam memelihara keharmonisan dan kerukunan antar umat yang plural. Dibandingkan dengan daerah lain, NTT termasuk wilayah Indonesia yang mengandalkan *local wisdom* atau kearifan lokal sebagai fondasi dan kekuatan untuk membangun sebuah kehidupan tanpa kekerasan dan lebih mengutamakan pendekatan kultural sebagai nilai fundamental bagi seluruh suku yang ada di NTT.¹⁶

Kebudayaan dan nilai moral serta kearifan lokal yang tumbuh berkembang di NTT sejak dahulu sebagai modal pemersatu umat sehingga masyarakat mampu menghargai dan menghormati antar pemeluk agama satu dengan lainnya, begitu juga antara suku yang satu dengan suku lainnya. Begitu tingginya toleransi di NTT sehingga provinsi ini mendapat julukan Nusa Terindah Toleransi.¹⁷

Salah satu organisasi yang memegang peran penting terciptanya kerukunan antar umat beragama di NTT ialah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)¹⁸. Dengan

¹⁴ Mery Kolimon, "Agama Menjunjung Kemanusiaan," in *Agama, Keterbukaan Dan Demokrasi Harapan Dan Tantangan*, ed. Franz Magnis-Suseno (Jakarta Selatan: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation dan The Ford Foundation, 2015). 37.

¹⁵ Kolimon. 38.

¹⁶ Takdir, "Model-Model Kerukunan Umat Beragama Berbasis Local Wisdom." 6.

¹⁷ Takdir. 7.

¹⁸ **Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)** adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Pembentukan FKUB didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama masing-masing No. 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006.

berbagai program dan ide toleransi yang dicetuskan membawa nama FKUB untuk menciptakan kerukunan umat beragama. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintahan dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Pembentukan FKUB didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama masing-masing No. 8 dan No. 9 Tahun 2006.¹⁹

Bermula dari munculnya berbagai ketegangan antar-umat beragama di beberapa daerah terutama antara Islam dan Kristen, yang bila tidak segera diatasi akan membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia, pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Antar Agama pada tanggal 30 November 1969 bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta yang dihadiri pemuka-pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Pemerintah mengusulkan perlunya dibentuk Badan Konsultasi Antar Agama dan ditandatangani bersama suatu piagam yang isinya antara lain menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.²⁰

Musyawarah menerima usulan pemerintah tentang pembentukan Badan Konsultasi Antar Agama, tetapi tidak dapat menyepakati penanda-tanganan piagam yang telah diusulkan pemerintah tersebut. Hal itu disebabkan oleh sebagian pimpinan agama belum dapat menyetujui usulan pemerintah (Presiden) tersebut, terutama yang menyangkut agar tidak boleh menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.²¹

¹⁹ Nazmudin, "Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Journal of Government and Civil Society* Vol. 1, no. 1 (2017). 28-29.

²⁰ Muhammad Anang Firdaus, "Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia," Jayapura Papua: Kontekstualita Vol. 29, no. 1 (2014). 61.

²¹ Firdaus. 62.

Musyawarah tersebut merupakan pertemuan pertama antar semua pimpinan/pemuka agama-agama di Indonesia untuk membahas masalah yang memang sangat mendasar dalam hubungan antar-umat beragama di Indonesia. Pertemuan itu kelak akan diikuti oleh berbagai jenis kegiatan antar-agama, antara lain; dialog, konsultasi, musyawarah, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis agama secara bersama ke daerah-daerah, seminar antar berbagai agama, sarasehan pimpinan generasi muda dan sebagainya.²²

Reaksi yang timbul akibat lahirnya FKUB cukup beragam. Secara ringkas, sikap yang muncul terhadap FKUB ini dapat dikategorikan menjadi 3 macam: *Pertama*, menerima kehadiran FKUB karena merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan membawa dampak positif dalam kehidupan umat beragama. Penerimaan ini biasanya didasari belum adanya suatu wadah atau forum yang secara khusus mengurus kehidupan antar-umat beragama.

Kedua, menerima keberadaan FKUB dengan menggabungkan atau melebur wadah atau forum yang serupa dengan FKUB yang sebelumnya sudah terbentuk di suatu wilayah. Adapun teknis penggabungan tersebut bisa dengan cara menghapus forum yang sudah terbentuk dan anggota pengurusnya menjadi anggota FKUB, atau bisa juga dengan tetap menjaga keberadaan dan tugas forum tersebut namun anggota forum itu juga menjadi anggota pengurus FKUB sebagaimana terjadi di Provinsi Papua.

Ketiga, menolak kehadiran FKUB meski tidak dapat menghalangi atau membatalkan terbentuknya FKUB di wilayah tersebut. Penolakan ini didasarkan pada sudah terbentuknya suatu wadah yang mewadahi seluruh elemen umat beragama dan telah eksis dalam memelihara kehidupan beragama di wilayah tersebut. Di samping itu, ada kekhawatiran akan adanya banyak intervensi pemerintah karena FKUB difasilitasi

²² Firdaus. 63-64.

oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada kinerja FKUB yang kurang optimal karena komunikasi yang terhambat dan hubungan yang tidak harmonis.²³

FKUB merupakan tempat dimusyawarakannya berbagai masalah keagamaan lokal dan dicarikan jalan keluarnya. FKUB ini akan bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.²⁴

Dalam rangka menumbuhkan, memelihara dan membiasakan kerukunan hidup umat beragama salah satu tugas FKUB adalah melakukan forum dialog. Dalam forum dialog tersebut semua pihak dapat saling mendengarkan informasi dari pihak lain dan dapat saling mengemukakan permasalahannya masing-masing. Untuk menjaga kerukunan hidup antar-umat beragama salah satunya dengan dialog antar umat beragama. Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat yang modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluarlitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan.²⁵

Kebanggaan akan tingginya kerukunan umat beragama tentu juga mengandung tanggung jawab moral yang tidak ringan. Setiap orang NTT harus mampu menjaga dan mempertahankan kerukunan antar umat beragama di NTT. Namun tidak berhenti sampai di sini. Tanggung jawab lain yang juga wajib diemban orang NTT di mana pun dia berada, entah di NTT atau di provinsi lain di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, adalah mempromosikan dan menjadi saksi atas kerukunan umat.

²³ Firdaus. 65.

²⁴ Firdaus. 66-70.

²⁵ Firdaus. 80-84.

Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pembentukannya oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan perhatian khusus dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Peran FKUB di Kota Kupang dalam membangun toleransi dan kerukunan umat beragama dilakukan dengan berbagai program. FKUB Kota Kupang memiliki program rutin dan tidak rutin dalam membangun toleransi dan kerukunan umat beragama. Program rutin seperti: dialog, seminar, sosialisasi dan lomba pidato serta lomba hymne dan mars kerukunan. Sementara program tidak rutin misalnya: penerbitan buku, pembuatan striker, kalender dan spanduk keagamaan. Melalui program ini, FKUB Kota Kupang berupaya membangun dan menciptakan kerukunan antar umat beragama.²⁶

Seiring dengan semakin hilangnya batas-batas pergaulan antara manusia yang lebih sering disebut globalisasi, persoalan di sekitar hubungan antara beragama menjadi bertambah kompleks. Kebanyakan orang saat ini menghindari pergaulan dengan yang beragama lain. Kondisi saat ini tentunya sangat berbeda jauh dengan apa yang terjadi pada zaman dulu ketika umat-umat beragama hidup di kamp-kamp yang terisolir dari tantangan luar. Sewaktu pada masa jemaat mula-mula, saat pemeluk umat beragama masih terisolir, konflik biasanya hanya terjadi dalam satu agama saja, akan tetapi begitu memasuki era globalisasi, maka umat beragama memasuki era konflik yang mematikan, di mana konflik yang dimaksudkan ini terjadi bukan hanya dalam satu agama saja melainkan dapat melingkupi relasi dengan umat yang beragama lain. Bila hal ini tidak segera diatasi maka tentunya tidak ada penyelesaian yang dapat dicapai untuk mengakhiri konflik secara menyeluruh.

Dalam kondisi ini, hadirilah seorang teolog protestan bernama Theodore Sumartana, ia lahir pada tanggal 15 Oktober 1944 di Banjarnegara, Jawa tengah. Beliau

²⁶ Rinto Hasiholan Hutapea & Iswanto, "Potret Pluralisme Dan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Kupang," *Dialog* 43, no. 1 (2020): 105.

menyelesaikan pendidikan di STT Jakarta pada tahun 1971 dan bekerja pada Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-gereja Indonesia (1975-1982). Tahun 1991 Sumartana menyelesaikan studi doktoralnya dalam bidang Misiologi dan Perbandingan Agama dari *Vrije Universiteit Amsterdam* dengan menulis disertasi yang berjudul *Mission at the Crossroads: Indigenous Churches, European Missionaries, Islamic Association and Socio-religious Change in Java 1812-1936*.²⁷

Meskipun berasal dari keluarga Protestan, Sumartana merupakan pengikut dari Kyai Sadrach tidak menjadikannya menjadi seorang pengikut Kristen fanatik yang tidak menghargai keberadaan pemeluk agama lain, bahkan justru sebaliknya dia menjadi orang yang sangat gigih memperjuangkan perdamaian antara pemeluk agama, khususnya di Indonesia. Sumartana meniti karier sebagai redaktur bidang teologi pada penerbitan BPK Gunung Mulia sejak tahun 1972 hingga 1975, kemudian menjadi staf peneliti di Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-gereja di Indonesia, Jakarta tahun 1975-1982. Keinginan untuk menularkan ilmu, membawa Sumartana menjadi pengajar tetap pada Program Pasca sarjana Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Di Universitas ini, ia sempat mengabdikan selama kurang lebih 5 tahun (1991-1995).²⁸

Pada tanggal 10 Agustus 1992²⁹ bersama-sama dengan teman-temannya Eka Darmaputera, Djohan Effendi, Daniel Dakhidae, dan Zulkifly Lubis mendirikan Institut Dialog Antar-Iman³⁰ (Institut DIAN/Interfidei) Yogyakarta. Sebagai teolog, Sumartana

²⁷ Diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia pada tahun 1994.

²⁸ Nugroho N, "Keragaman Keyakinan Sebuah Tantangan Dan Harapan Bagi Kerukunan Beragama: Studi Pemikiran Theodore Sumartana Tentang Keragaman Keyakinan," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 17, no. 2 (2016): 1-3.

²⁹ **Institut DIAN/Interfidei** (*Institute for Inter-faith Dialogue in Indonesia*) mengawali kegiatannya pada pertengahan tahun 1991, dan baru memperoleh pengakuan hukum sebagai Yayasan pada tanggal 20 Desember 1991. Tanggal 10 Agustus 1992 diresmikan dalam satu acara bersama di Yogyakarta.

³⁰ **Institut Dialog Antar Iman di Indonesia** (Institut DIAN) atau lebih dikenal dengan nama INTERFIDEI (*Institute for Inter-Faith Dialogue in Indonesia*), didirikan pada tanggal 20 Desember 1991 di Yogyakarta dengan akta notaris no. 38 (*de jure*). Secara resmi dipublikasikan kepada masyarakat luas sebagai sebuah Lembaga (*de facto*), tanggal 10 Agustus 1992. Institut DIAN/Interfidei didirikan oleh budayawan yakni alm. Dr. Th. Sumartana, bersama-sama sejumlah figur dengan latar belakang berbeda dan komitmen sosial religius yang kuat. Mereka adalah alm. Pdt. Eka Darmaputra, Ph. D., Daniel Dhakidae, Ph. D., alm. Zulkifly

tidak menghasilkan buku sistematis yang memuat kerangka pergulatan teologinya kecuali hanya berbagai esai-esai pendek yang tersebar di sana-sini. Namun dengan demikian, Sumartana kemudian dikenal sebagai seorang tokoh pluralisme.

Sumartana hadir dan berpendapat bahwa konteks yang dihadapi oleh agama-agama adalah pluralisme, meskipun dia menyadari bahwa itu bukan merupakan tantangan satu-satunya. Dia menulis, “Pluralisme telah menjadi ciri esensial dari dunia dan masyarakat, dunia modern yang mempunyai nama baru yaitu post-modern.”³¹ Pluralisme yang banyak dibicarakan sekarang bukan sekedar hasil dari sebuah proses multiplikasi kepelbagaian, bukan hanya ekstensif dan kuantitatif akan tetapi juga bersifat kualitatif berbeda dengan pluralisme di masa lampau. Pluralisme di masa sekarang didasarkan atas kesadaran yang semakin dalam dari setiap kelompok di masyarakat untuk beremansipasi dalam kehidupan bersama, mereka tampil bersama dan meminta pengakuan setara.³²

Dengan latar konteks pluralisme seperti itu, Sumartana berharap adanya sebuah zaman yang disebut dengan zaman emansipasi agama. Zaman ini ditandai, “ketika tidak ada satu hegemoni agama yang diakui. Semua agama adalah unik. Dan semua agama memiliki hak hidup yang sama.”³³ Kenyataan seperti di atas tentu membutuhkan respon dan tanggapan yang baru dari gereja. Namun, Sumartana merasakan bahwa kesibukan berteologi justru tidak terarah, tidak peka terhadap tanda-tanda zaman, berteologi tanpa konteks sosial.³⁴

Lubis, dan Dr. Djohan Effendi. Selain kelima orang pendiri tersebut, ada banyak orang yang ikut bersama dalam memikirkan kelahiran Interfidei, sejak embrio sampai terwujud. (<https://www.interfidei.or.id/>)

³¹ Theodore Sumarthana, “Meretas Jalan Teologi Agama-Agama Di Indonesia” (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 18.

³² Theodore Sumartana, “Peran Agama Dalam Pembentukan Etika Global: Perspektif Kristiani,” in *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar-Agama Dan Bangsa*, ed. Aswad Mahasin (Yayasan Festival Istiqal, 1996), 19.

³³ Theodore Sumartana, “Kemanusiaan: Titik Temu Agama-Agama,” in *Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga*, ed. Martin L. Sinaga (Jakarta: Grasindo, 2000), Hlm. 198.

³⁴ Sumartana, “Peran Agama Dalam Pembentukan Etika Global: Perspektif Kristiani.” 17.

Melihat kebuntuan atau bisa disebut juga dengan kemandulan teologi tersebut, Sumartana mengusulkan salah satu bentuk respons dalam menghadapi kenyataan pluralisme yaitu dengan cara mengembangkan format teologi yang bernama *Theologia Religionum*³⁵. *Theologia Religionum* merupakan “upaya refleksi teologis untuk menempatkan pluralisme sebagai pusat perhatian dan pusat persoalan.”³⁶

Sumartana dalam buku, “Meretas Jalan Teologia Agama-Agama di Indonesia”, mengatakan bahwa Tantangan keagamaan mendasar yang dihadapi sekarang ini diungkap dengan satu kata, yaitu pluralisme. Tidak ada maksud mengatakan bahwa pluralisme merupakan satu-satunya tantangan akan tetapi bila tantangan itu tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka agama-agama akan kehilangan persepsi yang benar tentang dunia dan masyarakat sekarang. Pluralisme telah menjadi ciri esensial dari dunia masyarakat sekarang. Dunia telah menjadi satu dan menjadi kampung kecil di mana umat manusia hidup bersama di dalamnya.³⁷

Untuk menyusun *theologia religionum* ada dua faktor yang sangat menentukan. Pertama adalah faktor *intern* (gerejawi), yakni tugas esensial dari setiap kelompok agama agar dirinya relevan dengan konteks. Faktor berikutnya adalah faktor *ekstern* (kehidupan agama-agama secara umum), respons agama terhadap keseluruhan masa depan masyarakat maupun agama-agama. Berpikir lebih positif tentang agama-agama dan masa depan bersama, bukan semata masa depan milik sendiri. Tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan.³⁸

³⁵ *Theologia Religionum* merupakan cabang ilmu teologi yang membahas bagaimana respons teologi kekristenan terhadap fakta pluralisme agama diluar agama Kristen. Tujuan dari *theologia religionum* ini adalah bagaimana kekristenan melihat dan memberikan penilaian teologis terhadap agama-agama lain. Masing-masing agama memiliki keunikannya tersendiri dan perlu dihargai eksistensinya; itulah sebabnya diperlukan suatu cara untuk hal yang dimaksud.

³⁶ Sumartana, “Theologia Religionum.” 19.

³⁷ Sumartana. 18.

³⁸ Sumartana. 20.

Sumartana melihat perlunya menafsirkan Kristologi secara baru, sehingga mampu memberi tempat bagi agama-agama lain. Ia melihat bahwa Kristologi yang berkembang dalam gereja-gereja di Indonesia adalah warisan dari Kristologi zending.³⁹ Gambaran Kristus di masa kolonial merupakan gambaran dari sebuah pusat yang memiliki kekuasaan penuh dan tidak terbuka bagi agama-agama.⁴⁰ Dengan merujuk pemahaman Kristologi ala *Paul Newman*, *Paul Knitter*, dan *Jon Sobrino*, dia mengusulkan untuk merumuskan sebuah Kristologi yang bercorak liberatif dengan bertitik tolak pada Yesus historis dan Yudaisme.⁴¹

Sebuah Kristologi yang cocok dengan konteks Indonesia, Kristologi yang dirangkai dari kesadaran dan pemahaman tentang konteks dan teks.⁴² Lebih dari itu, yang terpenting bagi Sumartana adalah agar pengakuan Kristologi tidak dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang dipakai untuk membuat justifikasi bagi mereka yang berbeda pendapat. Dan yang lebih penting adalah bentuk dan cara mempertahankan Yesus tersebut, menurut Sumartana, tidak perlu dan tidak bisa dilakukan dengan cara menginjak martabat serta melecehkan integritas kepercayaan orang lain. Sebaliknya, kalau kristologi benar-benar dianggap penting dan pusat, sebaiknya ia dibangun sebagai jembatan untuk memanusiakan manusia.⁴³

Kebebasan beragama dalam pemahaman Sumartana merupakan sebuah unsur yang sangat esensial baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan kehidupan nasional maupun kesejahteraan dan keamanan internasional. Mengingat betapa pentingnya kebebasan beragama bagi seorang individu, maka menurut Sumartana negara

³⁹ Theodore Sumartana, "Pemikiran Kembali Kristologi Untuk Menyongsong Dialog Kristen-Islam Di Indonesia," *Jurnal Teologi Dan Gereja Penuntun* Vol. 4, no. 13 (1997). 36.

⁴⁰ Sumartana. 36.

⁴¹ Julianus Mojau, "Model-Model Teologi Sosial Kristen Protestan Di Indonesia Sekitar Tahun 1970-an s/d 1990-an: Sebuah Sketsa Kritis," *Jurnal Teologi Proklamasi* Vol. 2, no. 3 (2003). 29.

⁴² Sumartana, "Pemikiran Kembali Kristologi Untuk Menyongsong Dialog Kristen-Islam Di Indonesia." 42.

⁴³ Sumartana. 42.

tidak boleh menentukan agama bagi warganya. Setiap agama harus mengembangkan gagasan *Theologia Religionum* yang bisa memberikan basis bagi dialog dan kerja sama antar-agama di masa depan.

Theologi Religionum dipandang sebagai salah satu solusi dalam upaya tulus untuk mempertahankan kerukunan antar umat bergama. Hal itu memungkinkan karena keyakinan teologi religionum dipandang sebagai upaya membangun jembatan komunikasi diantara umat ber-agama. *Theologi Religionum* muncul karena pada kenyataannya, hal kemajemukan dalam masyarakat yang terus berkembang dari masa ke masa, dan perkembangan pluralistik ini sesungguhnya membutuhkan metodologi yang cocok dalam upaya membangun hubungan kemasyarakatan yang lebih baik, dan pola pendekatan yang tepat untuk menjembatani kemajemukan tersebut akan memberi dampak yang baik pula dalam kehidupan beragama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **STUDI PEMIKIRAN THEODORE SUMARTANA DAN IMPLIKASINYA BAGI DIALOG UMAT BERAGAMA DI FKUB KOTA KUPANG.**

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang dapat dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana Biografi dan Pemikiran dari Theodore Sumartana tentang Dialog Antar Umat Beragama?
2. Bagaimana Dialog umat beragama di Kota Kupang?
3. Bagaimana Implikasi dari pemikiran Theodore Sumartana terhadap kehidupan dialog umat beragama FKUB Kota Kupang?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penulis adalah:

1. Untuk mengetahui gagasan Theodore Sumartana mengenai bentuk dialog antar umat beragama di FKUB Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui pandangan Theodore Sumartana terhadap tantangan dan hambatan dalam dialog antar umat beragama di FKUB Kota Kupang.
3. Untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan Theodore Sumartana yang relevan bagi dialog antar umat di FKUB Kota Kupang.

1.4. METODOLOGI

1. Metode Penulisan

Untuk menyelesaikan tulisan ini maka metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif-analitis-reflektif dengan menggunakan berbagai sumber kepustakaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kepustakaan. Kajian pustaka digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran Theodore Sumartana tentang Dialog Antar Umat Beragama, data dari perpustakaan berupa buku, artikel, jurnal ilmiah dan ensiklopedia yang mempunyai relevansi dengan tema tersebut.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih terstruktur pembahasan tulisan ini, maka penulis memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang riwayat atau biografi Theodore Sumartana dan karya-karya yang telah dibuatnya.

- BAB II** : Berisi tentang pemikiran-pemikiran serta pandangan Theodore Sumatana yang berkaitan dengan dialog umat beragama di FKUB Kota Kupang.
- BAB III** : Refleksi Teologis.
- PENUTUP** : Berisi Kesimpulan dan Saran.